

**LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026**



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JUMAPOLO
TAHUN 2024-2026**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH
2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah Nya, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumapolo Tahun 2024-2026, Kabupaten Karanganyar dapat diselesaikan. Dokumen Renstra Kecamatan Jumapolo Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan menjadi acuan bagi

Penyusunan dokumen perencanaan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Kecamatan Jumapolo Tahun 2024-2026 disusun dengan berdasarkan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah di lingkup Kecamatan Jumapolo

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap perangkat daerah di Kecamatan Jumapolo yang telah menyediakan data dan informasi serta masukan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga penyusunan ini bermanfaat bagi kemajuan Kecamatan Jumapolo dimasa mendatang.

Karanganyar, April 2023
Camat Jumapolo

HARYANTO. S.E.,M.A.P
Pembina
NIP : 19670514 198903 1 011

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode ini disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / RPJPD), perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ RKPD).

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan renstra Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Jumapolo untuk kurun waktu 3 tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Jumapolo sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Jumapolo adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 3 tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumapolo Tahun 2024-2026
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jumapolo untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Jumapolo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jumapolo yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Kecamatan Jumapolo.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Jumapolo

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Jumapolo.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jumapolo.

Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Jumapolo.
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Jumapolo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karangayar Tahun 2024-2026.
Bab VIII	Penutup Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Jumapolo.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JUMAPOLO

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

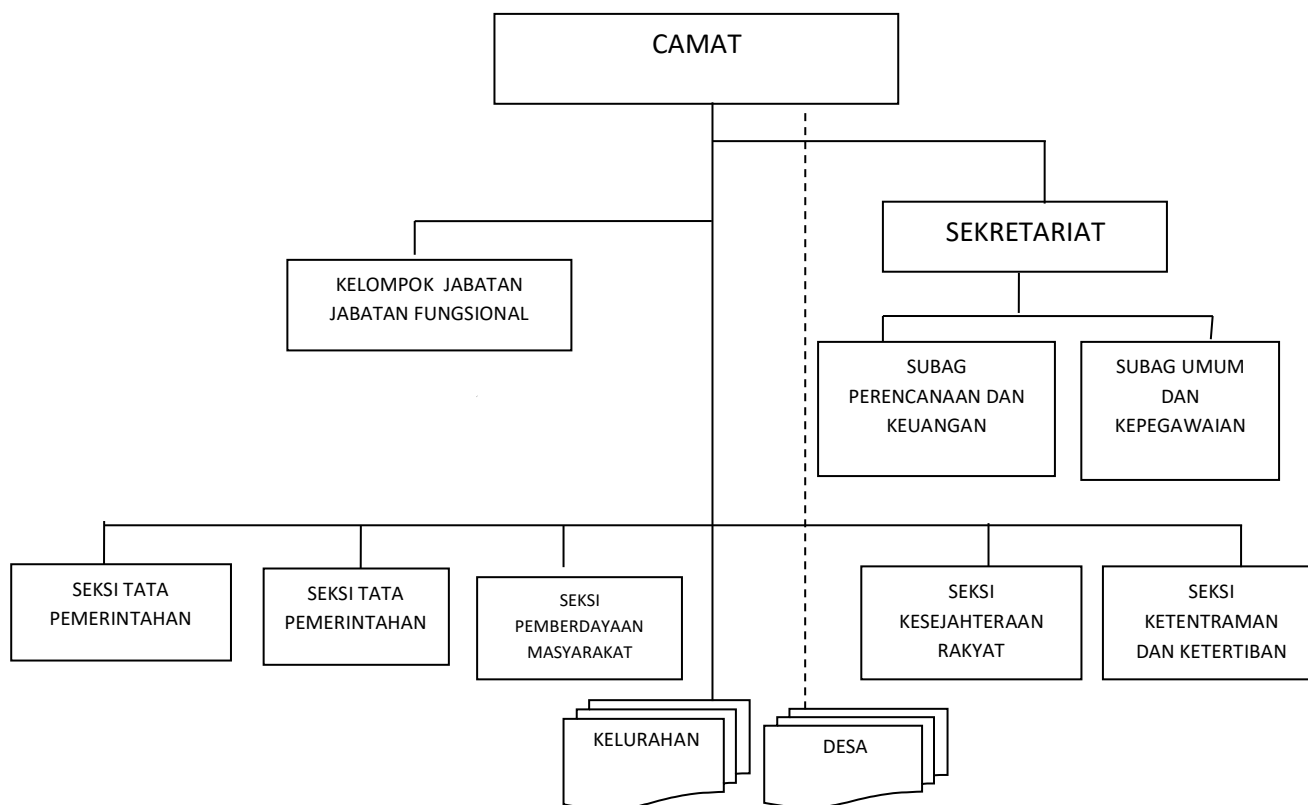
2.1.1 Struktur Organisasi

Kecamatan Jumapolo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Susunan organisasi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan ;
- h. Kelurahan.

Struktur organisasi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati; RPJMD Kabupaten Karanganyar maka Kecamatan Jumapolo melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan

prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;

- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;

- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- 4) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam

penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial; mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat terbentuknya sistem birokrasi yang efektif dan demokratis. Sumberdaya manusia merupakan faktor kunci dalam kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran. Jumlah pegawai di Kecamatan Jumapolo keadaan per 31 Desember 2022 sejumlah 16 orang, dengan komposisi rinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah	
		PNS		Non PNS			
		L	P	L	P	L	P
1	SMA/ Sederajat	4	1	11	1	16	2
2	Diploma 3	0	0	1	1	1	1
3	Sarjana/ S1	5	2	2	2	7	4
4	Magister/ S2	2	0	0	0	1	1
Jumlah		11	3	14	4	25	8

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jumapolo, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 9 % (3 orang); berpendidikan S1 sebesar 32.35 % (11 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan diploma sebesar 5,9 % (2 orang) dan 18 orang dengan pendidikan SMA (52.94 %).

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan III sebanyak 9 orang, Golongan IV 3 orang dan Golongan II masing-masing sebanyak 4 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	1	1	2
2.	Golongan III	7	2	9
3.	Golongan II	3	0	3
4.	Golongan I	0	0	0
5.	Non Golongan	0	0	0
Jumlah		11	3	14

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jumapolo, 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Jumapolo. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Jumapolo keadaan bulan Desember 2018 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jumapolo
Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Portable Generating Set	1	0	1
2	Station Wagon	1	0	1
3	Sepeda Motor	6	2	8
4	Almari Besi/Metal	4	0	4
5	Filling Besi/Metal	8	4	12
6	Papan Visual	1	2	2
7	Peta	0	1	1
8	Bacdrop Aula	1	0	1
9	Lemari Kayu	4	3	7
10	Meja Kayu /Rotan	5	2	7
11	Kursi Besi / Metal	80	0	80
12	Kursi Kayu / Rotan	39	1	40
13	Tempat Tidur Besi/Metal	2	0	2
14	Meja Rapat	12	1	13
15	Meja Makan	1	0	1
16	Meja Ketik	0	2	2
17	Meja Resepsionis	2	0	2
18	Kursi Tamu	1	0	1
19	Kursi Putar	0	8	8
20	Kursi Biasa	85	0	85
21	Bangku Tunggu	1	0	1
22	Kursi Lipat	100	0	100
23	Meja Komputer	2	0	2
24	Meja 1/2 Biro	22	6	28
25	Meubelair Lainnya	1	0	1
26	Korden	5	0	5

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
27	Rak TV	1	0	1
28	Jam Elecktronik	1	4	5
29	M.Potong Rumput	1	0	1
30	Mesin Cuci	1	0	1
31	Lemari Es	1	0	1
32	Ac Unit	3	0	1
33	Sofabed	1	0	1
34	Kipas Angin	3	0	3
35	Kitchen Set	1	0	1
36	Televisi	2	0	2
37	Cassete Recorder	1	1	2
38	Amplifier	2	0	2
39	Loudspeker	1	0	1
40	Sound System	3	0	3
41	Ware Less	1	0	1
42	Tiang Bendera	1	0	1
43	Mimbar / Podium	1	0	1
44	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	0	3
45	P.C. Unit	3	1	4
46	Handycam	1	0	1
47	Lap Top	8	1	9
48	Personal Komputer Lainnya	0	1	1
49	Monitor	2	2	4
50	Printer	4	1	5
51	Meja Kerja Pejabat	7	0	7
52	Meja Tamu Biasa	4	0	4
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	0	5	5
54	Kursi Kerja Pejabat	10	0	10
55	Lemari Buku untuk Perpustakaan	0	2	2
56	Proyektor+Attachment	1	0	1
57	Microphone / Wireless Mic	3	1	4
58	Mesin Pres	0	1	1
59	Handy Talky (HT)	1	0	1
60	Facsimile	1	0	1
	Jumlah	457	52	506

Sumber : Data Aset Kecamatan Jumapolo, 2023

2.3. Keadaan Geografis

2.3.1 Letak Geografis

Kecamatan Jumapolo merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari Ibukota kabupaten 18 km arah timur. Luas wilayah Kecamatan Jumapolo adalah 55,67 km² dengan ketinggian rata-rata 470 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Jumapolo:

Sebelah Utara	:	Kec. Jumantono
Sebelah Selatan	:	Kec. Jatipuro
Sebelah Barat	:	Kec. Kab. Sukoharjo
Sebelah Timur	:	Kec. Jatiyoso

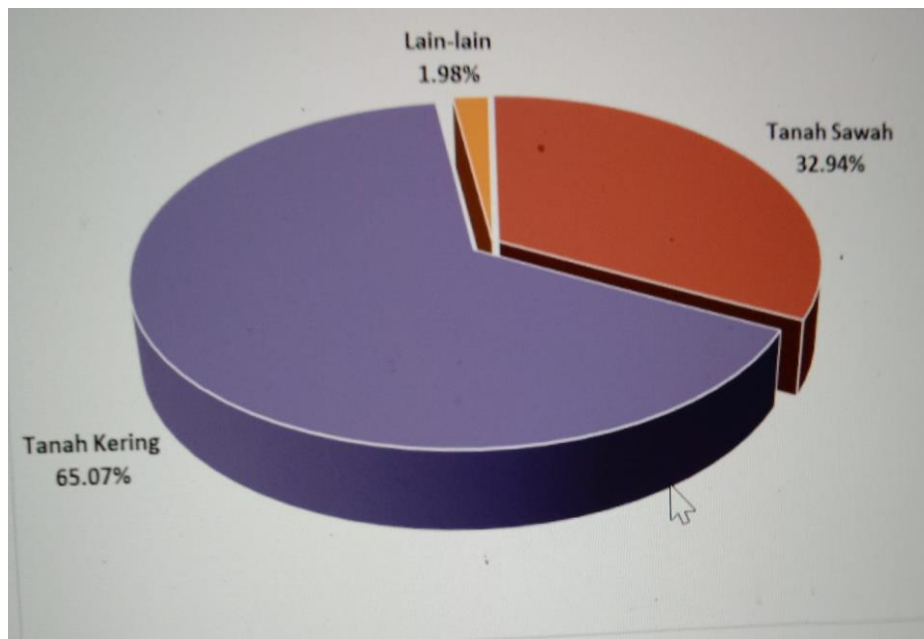
PETA WILAYAH



2.3.2 Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Jumapolo adalah 5.567,021 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 1.833,893 Ha, dan luas tanah kering 3.733,128 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 0,000 Ha, $\frac{1}{2}$ teknis 306,601 Ha, sederhana 973,301 Ha dan tadah hujan 553,991 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/bangunan 2.019,400 Ha, luas untuk tegalan/kebun 1.592,232 Ha., dan tanah lainnya 110,496 Ha.

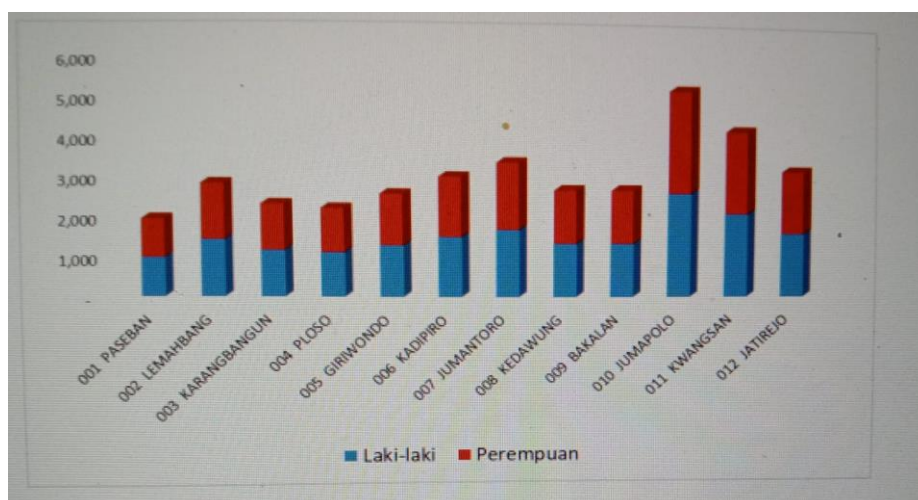
GARAFIK LUAS LAHAN



2.3.3 Kependudukan

Jumlah penduduk di Kecamatan Jumapolo tahun 2022 sebanyak 43.189 jiwa yang mana terdiri dari laki-laki sejumlah 21.681 jiwa dan perempuan sejumlah 21.508 jiwa.

GRAFIK JUMLAH PENDUDUK



Tabel 2.3
Klasifikasi Desa di Kecamatan Jumapolo Tahun 2022

No	Desa	Status Pemerintahan	Klasifikasi Desa		
			Swadaya	Swakarsa	Swasembada
1	Paseban	desa	-	-	1
2	Lemahbang	desa	-	-	1
3	Karangbangun	desa	-	-	1
4	Ploso	desa	-	-	1
5	Giriwondo	desa	-	-	1
6	Kadipiro	desa	-	-	1
7	Jumantoro	desa	-	-	1
8	Kedawung	desa	-	-	1
9	Bakalan	desa	-	-	1
10	Jumapolo	desa	-	-	1
11	Kwangsan	desa	-	-	1
12	Jatirejo	desa	-	-	1
Jumlah			0	0	12

Sumber: Kecamatan Jumapolo Dalam Angka, 2022

Kecamatan Jumapolo terdiri dari 12 desa, 103 dusun, 137 dukuh, 114 RW dan 314 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi desa swa sembada. Desa dengan dusun terbanyak adalah Desa Jumapolo dan Desa Karangbangun, yaitu 12 dusun dan yang paling sedikit adalah Desa Paseban, Lemahbang, Karangbangun dan Giriwondo, yaitu 7 dusun. Desa dengan jumlah RT terbanyak adalah Desa Karangbangun dan Jumapolo, yaitu 37 RT dan yang paling sedikit adalah Desa Paseban, yaitu 15 RT.

1. Kondisi Sosial

a. Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar, di Kecamatan Jumapolo pada tahun 2022 jumlah SDN sebanyak 12 sekolah dengan banyak guru 233, SD S sebanyak 3 sekolah dengan guru sebanyak 41 orang, MI sebanyak 6 sekolah dengan banyak guru 57 orang, SLTPN sebanyak 3 sekolah dengan guru sebanyak 83, SLTPS sebanyak 1 sekolah dengan guru sebanyak 9, MTs sebanyak 1sekolah dengan jumlah guru 39 orang, SMUN sebanyak 1 sekolah dengan jumlah guru 51 orang.

b. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Jumapolo terdiri dari 1 Puskesmas, 4 Puskesmas Pembantu, 5 Rumah Bersalin dan 104 posyandu. Sementara itu tenaga kesehatan yang tersedia terdiri dari

dokter umum 4 orang, bidan / bidan desa 6 orang , dan mantri kesehatan 2 orang.

c. Keluarga Berencana

Peserta KB aktif di Kecamatan Jumapolo pada tahun 2022 mencapai 6018 peserta atau 74,68 % dari banyaknya PUS tahun 2022 (8058). Alat kontrasepsi yang paling banyak diminati adalah suntik sebanyak 3.588 peserta, dan IUD sebanyak 668 akseptor. Kecamatan Jumapolo yang sebagian besar daerahnya merupakan pegunungan, tahapan keluarga pra sejahtera sebanyak 2.540 KK, keluarga sejahtera I sebanyak 681 KK , dan keluarga sejahtera II sebanyak 429 KK. Sementara itu keluarga sejahtera III sebanyak 9.416 KK dan III + sebanyak 139 KK.

Tabel 2.4
Jumlah PUS dan Akseptor KB Tahun 2022

No	Desa	Jumlah PUS	Akseptor KB	Persentase Akseptor KB Terhadap PUS
1	Paseban	579	454	78,41
2	Lemahbang	532	423	79,51
3	Karangbangun	570	428	75,09
4	Ploso	531	415	78,15
5	Giriwondo	657	510	77,63
6	Kadipiro	902	709	78,60
7	Jumantoro	762	566	74,28
8	Kedawung	580	403	69,48
9	Bakalan	520	374	71,92
10	Jumapolo	975	656	67,28
11	Kwangsan	774	606	78,29
12	Jatirejo	676	474	70,12
	Jumlah	8058	6018	74,68

Sumber: Kecamatan Jumapolo Dalam Angka, 2022

Jumlah PUS 8058 Aseptor 6018

d. Pemeluk Agama dan Tempat Peribadatan

Pembangunan di bidang kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diarahkan agar mampu meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kerukunan hidup yang erat. Pemeluk agama di Kecamatan Jumapolo terdiri dari Islam : 41.724 orang, Kristen Katholik : 3.088 orang, Kristen Protestan : 361 orang, Hindu : 14 orang dan Budha : 17

orang. Di Kecamatan Jumapolo pada tahun 2020 terdapat tempat ibadah, yaitu masjid 159 buah, mushola 9 buah, gereja 5 buah, Vihara 0 buah dan Pura 0 buah.

2. Kondisi Ekonomi

a. Sarana Perekonomian

Guna menunjang laju perekonomian di Kecamatan Jumapolo pada tahun 2022 terdapat pasar 4 buah, mini market 4 buah, rumah makan 1 buah, kedai/warung makan 81 unit, toko/warung kelontong sebanyak 302 buah, bank umum 2 unit, BPR 5 unit dan KUD 1 unit.

b. Kendaraan Bermotor dan tidak Bermotor

Pada tahun 2022 di Kecamatan Jumapolo, jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki warga adalah truk/colt : 58 buah, angkudes 12 unit, mobil dinas/pribadi : 284 buah dan sepeda motor : 5.321 buah. Sedangkan jumlah sepeda sebanyak 1.529 buah.

2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jumapolo. Kinerja Pelayanan di Kecamatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidangkerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Jumapolo selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yangtersedia masih mencukupi.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Jumapolo setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Jumapolo setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepadamasyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Jumapolo setiap tahunnya mengalami pembaharuan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Jumapolo setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan dan semakin meningkat harga barang di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terusbertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Jumapolo dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung

perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumapolo
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai SAKIP	Skor	100	100	100	70,55	NA	NA	70,55	NA	NA
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	72	74	75	80,09	82,03	NA	112,3	112,3	NA
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	NA	79,26	99,99	NA	79,26	99,99	NA
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	NA	85,84	100	NA	85,84	100	NA
5	Persentase wilayah tertib perda	%	100	100	NA	58,29	96,97	NA	58,29	96,97	NA
6	Persentase Desa memiliki APDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	NA	88,36	99,38	NA	88,36	99,38	NA

Tabel. 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jumapolo
Kabupaten Karanganyar

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.046.911.000	2.479.933.750	2.304.421.374	1.911.334.914	189.263.628	198.872.526
1	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	18.720.000	18.720.000	20.120.000	16.477.585	15.531.377	927.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.600.000	285.160.000	312.100.000	84.599.500	283.250.000	15.623.326
3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	900.000	1.000.000	800.000	900.000	90.000.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.020.000	5.000.000	7.500.000	7.020.000	4.758.650	14.425.600
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	2.000.000	2.000.000	4.435.000	1.962.000	9.244.000
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.280.000	2.280.000	2.280.000	1.920.000	1.760.000	5.432.600
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.980.000	22.600.000	11.200.000	11.165.000	19.740.000	3.840.000
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.000.000	60.230.000	10.800.000	925.000	59.367.500	13.405.000

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	NA	NA	1.630.000	NA	NA	NA
10	PenyediaanBahanLogistik Kantor	13.405.000	2.000.000	29.800.000	9.739.174	16.500.000	NA
11	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000	6.036.400	4.120.000	5.900.000	6.518.800	NA
12	PenyediaanPerlengkapanRumahTa ngga	4.000.000	2.000.000	2.000.000	3.975.000	1.999.200	NA
13	PenyediaanBahanLogistik Kantor	12.000.000	7.320.000	10.980.000	10.513.500	7.293.400	NA
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas jabatan	46.000.000	40.000.000	40.000.000	37.142.400	37.787.413	NA
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	8.660.000	5.750.000	6.585.000	7.030.000	NA
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NA	49.410.000	7.000.000	NA	46.613.500	NA
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin	34.920.000	116.650.000	15.577.500	34.100.000	111.575.000	NA
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	900.000	900.000	5.000.000	629.900	900.000	NA
19	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	900.000	900.000	900.000	892.500	900.000	NA
20	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	900.000	1.780.000	900.000	795.000	1.655.000	NA

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IhktisarRealisasi Kinerja SKPD	900.000	900.000	900.000	750.900	900.000	NA
22	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	900.000	NA	NA	NA
23	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	1.808.506.000	1.847.893.750	1.857.341.374	1.707.069.455	1.737.364.224	NA
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.000.000	1.000.000	5.000.000	923.000	1.000.000	NA
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	500.000	500.000	3.000.000	498.000	500.000	NA
2	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	500.000	500.000	2.000.000	425.000	500.000	NA
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.000.000	17.700.000	20.000.000	11.889.000	17.698.000	NA
1	PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	5.000.000	7.700.000	10.000.000	3.920.000	7.700.000	NA

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	7.969.000	9.998.000	NA
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	54.000.000	36.500.000	31.962.000	46.351.000	36.500.000	NA
1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	54.000.000	36.500.000	31.962.000	46.351.000	36.500.000	NA
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	16.460.000	102.290.000	53.600.000	9.594.800	99.191.250	NA
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4.000.000	95.090.000	48.200.000	3.450.000	91.991.250	NA
2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	12.460.000	7.200.000	5.400.000	6.144.800	7.200.000	NA

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.816.000	30.190.000	21.500.000	41.133.300	30.001.400	NA
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	4.376.000	2.000.000	2.000.000	2.881.800	1.980.000	NA
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.600.000	2.000.000	NA	1.269.900	2.000.000	NA
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	41.040.000	21.600.000	15.500.000	33.174.000	21.461.400	NA
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.800.000	4.590.000	4.000.000	3.807.300	4.560.000	NA
	JUMLAH	2.210.026.000	2.667.613.750	2.436.483.874	2.047.031.840	2.532.196.714	NA

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jumapolo memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

1. Tantangan

- a. Adanya tuntutan pengembangan teknologi;
- b. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan;
- d. Cepatnya arus informasi masyarakat dalam menyampaikan, saran keluhan dan masukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Peluang

- a. Adanya tuntutan implementasi *Good Governance* dan *Clean Government* untuk meningkatkan kinerja;
- b. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- c. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
- d. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
- e. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN JUMAPOLO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
- e. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;

- c. Masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan wilayah;
- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumapolo, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jumapolo yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Kecamatan Jumapolo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparat masih perlu ditingkatkan.	a. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; b. belum optimalnya pemahaman aparat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparat d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparat pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan a. kurangnya kualitas SDM aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparat desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum a. belum optimalnya sosialisasi Perda;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
		kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. masih kurangnya sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan; h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. Seksi Kesejahteraan Sosial a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial; b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya tingkat pengangguran; d. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

Sumber: Hasil analisis, 2019

3.2. Telaahan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan adalah:

Meningkatkan Daya Saing Daerah

Penjelasan unsur visi menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, ditetapkan sasaran-sasaran Pokok pembangunan daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat gotong royong
3. Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran pokok tersebut diperlukan strategi dalam pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial dengan melaksanakan:
 - a. Meningkatkan pemerataan pembangunan melalui universal akses, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah serta pembangunan kawasan strategis pedesaan
 - b. Meningkatkan perlindungan sosial melalui pemenuhan SPM bidang sosial

2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat gotong royong dengan:
 - a. Meningkatkan kualitas daya saing SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya literasi, dan mendorong pemenuhan APM bidang pendidikan dan kesehatan.
 - b. Meningkatkan kesetaraanb gender dan pemenuhan hak anak melaui peningkatan pemberdayaan perempuan, penanganan kekerasan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak
 - c. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Karanganyar dan kawasan industri disekitar Karanganyar, peningkatan penempatan kerja, peningkatan penyelesaian hubungan industri
 - d. Meningkatkan kualitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga melaui pengembangan kapasitas daya saing pemuda dan olah raga
3. Penigkatan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal dengan: meningkatkan daya saing perekonomian melalui9 pembangunan dan perawatan jalan serta pengutan koperasi dan UKM, fasilitasi indutri kecil, peningkatan volume perdagangan, peningkatan hasil pertanian, peningkatan daya tarik wisata berdasarkan kebudayaan dan potensi daerah
4. Peningkatan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi dengan:
 - a. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, penigkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, peningkatan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah dan meningkatkan kualitas arsip daerah
 - b. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah

- c. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik dan peningkatan keamanan dan ketertiban umum
5. Peningkatan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan dengan: meningkatkan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana dan peningkatan kualitas lingkungan

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian diatas isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
5. Terjadinya penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat;
6. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
7. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar selama tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan:
 - **Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi**
 - **Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial**
- b. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
 - **Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan**
 - **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa**

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jumapolo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jumapolo Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
						2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	70	72	73	75	75
			Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	100	72	73	74	74
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan			%	8,96	8,52	8,45	8,03	8,03
			Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,73	0,75	0,75	0,75	0,75

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1. Strategis

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi penatalaksanaan kantor, peningkatan kapasitas SDM, penambahan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan, optimalisasi penataan aset dan pemenuhan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan komitmen dan koordinasi baik internal maupun eksternal kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pendekatan kearifan lokal;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang pembangunan, baik dalam proses, pelaksanaan maupun pengawasan melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta; pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat

5.2. Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana berdasarkan prioritas kebutuhan;
2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, efisien dan transparan;

3. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan dengan focus pada pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat
- Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Kecamatan Jumapolo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jumapolo
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
-Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi - Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	- Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan - Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi penatalaksanaan kantor, peningkatan kapasitas SDM, penambahan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan, optimalisasi penataan aset dan pemenuhan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana berdasarkan prioritas kebutuhan
		2. Meningkatkan komitmen dan koordinasi baik internal maupun eksternal kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pendekatan kearifan lokal	2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, efisien dan transparan
		3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang pembangunan, baik dalam proses, pelaksanaa maupun pengawasan melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta; pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat	3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan dengan focus pada pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2022

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan disusun dimaksudkan untuk menjawab isu strategis yang ada di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Rencana Program dan Kegiatan memuat indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan jangka Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD
 - 1.2. Penyusunan RKA-DPA
 - 1.3. Penyusunan Renstra OPD
 - 1.4. Penyusunan Renja OPD
 - 1.5. Penyusunan CALK OPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3.4. Penyediaan bahan logistik rumah dinas
 - 3.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 3.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 3.7. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 3.8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam /luar daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1. Penyediaan Jasa surat menyurat
 - 4.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 5.3. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 5.4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Pengadaan Mebel
 - 6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.3. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum
 - 1.1. Fasilitasi Efektivitas percepatan standarpelayanan minimal di wilayah kecamatan
 - 1.2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 1.2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
 - 1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 1.2. Pembinaan Linmas dan Pembinaan Wilayah

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

- 1.2. Pembinaan Kerukunan antar suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
- 1.3. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
- 1.4. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 1.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 1.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 1.4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 1.5. Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 1.6. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Selanjutnya Program dan Kegiatan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karangayar tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1. sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

TUJUAN OPD	SASARA N OPD	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGR AM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANG KAT DAERAH	
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			URUSAN KEWILAYAHAN												
			KECAMATAN				2.835.390.000		2.894.659.500		2.958.842.000		8.688.891.500		
Meningkatka n tata pemerintaha n yang berkualitasd engan semangat Reformasi Birokras				Indeks Reformasi Birokrasi		72		73		75		75			
	Meningka tkan kualitas tata laksanape merintah an			Nilai SAKIP	Nilai	72		73		74		74			
1		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	73	2.700.000.000	74	2.735.000.000	75	2.789.700.000	75	8.224.700.000	Kec. Jumapol o	

		70101201	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	7.170.000	8	9.670.000	8	12.170.000	24	29.010.000	
		7010120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	Jumlah Dokumen Restra, Renja Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3.000.000	3	5.000.000	3	7.000.000	9	15.000.000	
		7010120102	Koordinsi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	Dokumen	2	1.290.000	2	1.290.000	2	1.290.000	6	3.870.000	
		7010120104	Koordinsi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	Dokumen	2	1.380.000	2	1.380.000	2	1.380.000	6	4.140.000	
		7010120107	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	JumlahLaporanCapaian Kinerja OPD	Laporan	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	3	6.000.000	
		70101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1.879.330.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	5.879.330.000	
		7010120201	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	JumlahPenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	15	1.879.330.000	15	2.000.000.000	15	2.000.000.000	15	5.879.330.000	
		70101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	40	60.000.000	40	65.000.000	40	70.000.000	40	195.000.000	
		7010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	40	60.000.000	40	65.000.000	40	70.000.000	40	195.000.000	

		70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	87.500.000	100	99.500.000	100	131.000.000	100	328.000.000	
		7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasilistrik/ penerangan bangunankantor	Paket	12	7.500.000	12	5.000.000	12	12.000.000	36	29.500.000	
		7010120602	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	30.000.000	
		7010120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	Paket	12	3.000.000	12	3.500.000	12	4.000.000	36	10.500.000	
		7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistic kantor	Paket	12	12.000.000	12	12.500.000	12	15.000.000	36	39.500.000	
		7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	36	47.000.000	
		7010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Dokumen	12	3.000.000	12	4.000.000	12	5.000.000	36	12.000.000	
		7010120607	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	15.000.000	12	22.000.000	12	25.000.000	36	62.000.000	
		7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	36	75.000.000	
		7010120610	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip SKPD	Dokumen	6	5.000.000	6	2.500.000	6	10.000.000	18	22.500.000	

		70101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Unit	12	245.000.000	12	115.330.000	12	109.530.000	36	469.860.000	
		7010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebaelair yang diadakan	Unit	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	18	60.000.000	
		7010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang tersedia	Unit	3	25.000.000	3	15.330.000	3	25.000.000	9	65.330.000	
		7010120709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	150.000.000	1	50.000.000	1	14.530.000	3	214.530.000	
		7010120710	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	50.000.000	2	30.000.000	2	50.000.000	6	130.000.000	
		70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	353.000.000	12	366.000.000	12	375.000.000	36	1.094.000.000	
		7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Bulan	12	3.000.000	12	4.000.000	12	5.000.000	36	12.000.000	
		7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Bulan	12	25.000.000	12	27.000.000	12	30.000.000	36	82.000.000	
		7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	325.000.000	12	335.000.000	12	340.000.000	36	1.000.000.000	

		70101208	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	30	68.000.000	30	79.500.000	30	92.000.000	90	239.500.000	
		7010120802	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dina satau kendaraan dinasj abatan	Unit	9	40.000.000	9	42.500.000	9	45.000.000	27	127.500.000	
		7010120805	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor	Unit	12	3.000.000	12	5.000.000	12	7.000.000	36	15.000.000	
		7010120806	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	8	5.000.000	8	7.000.000	8	10.000.000	24	22.000.000	
		7010120810	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	Paket	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	3	75.000.000	
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,5	1.000.000	83,5	1.050.000	84,5	1.102.500	84,5	3.152.500	Kec. Jumapolo
		70102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Laporan	14	1.000.000	14	1.050.000	14	1.102.500	42	3.152.500	

		7010220202	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	500.000	1	550.000	2	602.500	6	1.602.500	
		7010220203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	500.000	1	500.000	2	500.000	36	1.500.000	
	Meningkatkan kondusifitas wilayah			Jumlah Kasus Gangguan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan		0		0		0		0		
3		70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	36.500.000	100	38.325.000	100	40.241.250	100	115.066.250	Kec. Jumapolo
		70104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	12	36.500.000	12	38.325.000	12	40.241.250	36	115.066.250	
		7010420101	Snergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	36.500.000	12	38.325.000	12	40.241.250	36	115.066.250	
4		70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Wilayah Tertib Perda	%	100	50.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	195.000.000	Kec. Jumapolo

		70105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	8	50.000.000	8	70.000.000	8	75.000.000	8	195.000.000	
		7010520103	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	90	45.000.000	90	60.000.000	90	60.000.000	270	165.000.000	
		7010520104	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama , Ras , dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regeonal dan Nasional	Orang	90	5.000.000	90	8.000.000	90	10.000.000	270	23.000.000	
		7010520105	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Paket	0	0	2	2.000.000	2	5.000.000	2	7.000.000	
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial				Angka Kemiskinan	%	8.52		8.45		8.03		8.03		
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa			Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75		0,75		0,75		0,75		

5		70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	17.700.000	100	18.585.000	100	19.514.250	100	55.799.250	Kec. Jumapol o
		70103202	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	bulan	12	17.700.000	12	18.585.000	12	19.514.250	12	55.799.250	
		701030201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga yang berartispasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Lembaga Kremasyara katan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	30.000.000	
		7010320103	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberda yaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	7.700.000	12	8.585.000	12	9.514.250	36	25.799.250	
6		70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan	%	100	30.190.000	100	31.699.500	100	33.284.000	100	95.173.500	Kec. Jumapol o
		70106201	Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan PengawasanPemer intahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	14	30.190.000	14	31.699.500	14	33.284.000	14	95.173.500	
		7010620101	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan PeraturanKepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi penyusunanAPBD des dan Perdeslainnya	Dokumen	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	6.000.000	

		7010620102	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan administrasi desa	Dokumen	1	0	1	0	1	2.000.000	1	2.000.000	
		7010620103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan Siskeudes, fasilitasi pencairan : ADD, DD, Pajak Retribusi dan bantuan keuangan, fasilitasi pengelolaan asset desa	Dokumen	6	16.190.000	6	17.699.550	6	21.283.950	6	55.173.550	
		7010620105	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi pembinaan perangkat desa	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	15.000.000	
		7010620106	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0		1	5.000.000	1	0	1	5.000.000	
		7010620108	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	2	5.000.000	2	2.000.000	2	5.000.000	2	12.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar 2024 - 2026. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Jumapolo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Target Tahun Periode RPD (2024-2026)			Target Akhir RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	70	72	73	75	75
2.	Nilai SAKIP OPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	Nilai	70.55	100	72	73	74	74
3.	Angka Kemiskinan	Data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey social ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah	%	9,85	8,96	8,52	8,45	8,03	8,03

4.	Indeks Desa Membangun	Dengan aplikasi E-IDM dari Kemendes di tingkat Kecamatan	Indeks	0,69	0,73	0,75	0,75	0,75	0,75
----	-----------------------	--	--------	------	------	------	------	------	------

Tabel 7.2**Indikator Program Kecamatan Jumapolo Tahun 2024-2026**

NO	URUSAN/PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Target Tahun Periode RPD (2024-2026)			Target Akhir RPD
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	73	74	75	75
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82.5	83.5	84,5	84.5
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	100
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	%	100	100	100	100
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jumapolo agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jumapolo dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Jumapolo akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Jumapolo.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Jumapolo, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Jumapolo sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2024-2026, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jumapolo .

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

